

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ANALISIS PENGGANGGARAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BERAU

HANDAYANI JAKA SAPUTRA², TAMAM ROSID²

Handayani8633@gmail.com

Tamamrosid77@gmail.com

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Berau
Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Berau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan beberapa variabel, yakni: implementasi anggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran, akuntabilitas, dan penggunaan informasi kinerja dalam merumuskan perencanaan dan anggaran tahun mendatang. Penelitian diselenggarakan di Pemerintah Desa di Kabupaten Berau yang meraih status Desa Mandiri dengan menggunakan seluruh Perangkat Desa sebagai obyek penelitian. Responden penelitian adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam praktik perumusan perencanaan dan anggaran, serta pelaporan akuntabilitas kinerja Desa. Sejumlah 150 kuesioner dibagikan, dan hanya 97 yang diisi lengkap dan dapat diuji. Pengujian hipotesis dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berhubungan positif terhadap penyerapan anggaran dan akuntabilitas perangkat desa. Selain itu, akuntabilitas yang baik juga menjadikan aparatur Pemerintah desa tergiring menggunakan laporan akuntabilitas sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran untuk periode mendatang pada pemerintah desa dengan status desa mandiri.

Kata Kunci: Pemerintah desa, anggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran, akuntabilitas, penggunaan informasi kinerja

ABSTRAK

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

This research aims to examine the relationship between several variables, namely: performance-based budget implementation, budget absorption, accountability, and the use of performance information in formulating plans and budgets for the coming year. The research was conducted at the Village Government in Berau Regency which achieved Independent Village status by using all Village Apparatus as research objects. Research respondents are village officials who are directly involved in the practice of formulating planning and budgets, as well as reporting accountability for village performance. A total of 150 questionnaires were distributed, and only 97 were filled out completely and could be tested. Hypothesis testing is carried out using the Structural Equation Model (SEM) approach. The research results show that performance-based budgeting is positively related to budget absorption and accountability of village officials. Apart from that, good accountability also encourages village government officials to use accountability reports as a reference in planning and budgeting for the next period in village governments with independent village status.

Keywords: Village government, performance-based budget, budget absorption, accountability, use of performance information

LATAR BELAKANG

Konsep anggaran berbasis kinerja telah lama menjadi produk reformasi pengelolaan keuangan organisasi sebagai bagian dari agenda besar *New Public Management* di seluruh dunia (Robinson 2011; Jong *et. al.*, 2013; Bawono 2015; Widodo 2016). Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, inisiatif penerapan anggaran berbasis kinerja ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (PP 105/2000) yang memberikan amanat kepada semua lapisan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 peraturan tersebut yang dengan tegas menyebutkan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun dengan pendekatan kinerja. Selanjutnya, terbit pula Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) yang mengatur perihal pengelolaan keuangan (penganggaran dan akuntansi) untuk pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Dan UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan amanah dan tanggungjawab terhadap desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan dana desa. UU ini juga

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

merupakan aturan yang terkait dengan tahapan penganggaran mulai dari penyusunan hingga realisasinya, prinsip-prinsip anggaran dan pengelolaan keuangan, sistem pengelolaan keuangan terkini (akuntansi berbasis akrual, anggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah), pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Bawono 2015).

Implementasi anggaran berbasis kinerja dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia pada kenyataannya dirasakan masih belum maksimal. Departemen Keuangan Republik Indonesia (2009) mengakui bahwa karakteristik utama anggaran berbasis kinerja yaitu penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*) masih belum tercermin dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini ada. Program dan kegiatan belum dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas kinerja suatu unit kerja. Bawono (2015) juga mengungkapkan bahwa anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia hanya diterapkan secara parsial akibat masih membudayanya pendekatan *line-item* dan *incremental* dalam sistem penganggaran yang ada, banyaknya peraturan-peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah hingga desa yang saling

bertentangan, dan lemahnya aspek pengukuran kinerja dalam proses reformasi penganggaran. Penelitian Mulihartanti (2013) menemukan bahwa dalam pelaksanaannya, pengukuran capaian kinerja hanya didasarkan pada persentase penyerapan anggaran semata dan tanpa perhatian terhadap *outcome* dari program/kegiatan tersebut. Selain itu, *system control* yang digunakan juga belum berjalan secara optimal sebab pengevaluasian keterlaksanaan program atau kegiatan dilakukan hanya secara kuantitatif.

Permasalahan praktis ini tentunya perlu mendapat perhatian serius untuk terus dibenahi implementasi. Karenanya, dukungan riset empiris yang mengkaji fenomena kegagalan dan kesuksesan implementasi anggaran berbasis kinerja penting dilakukan dan memang sudah banyak dilakukan. Hanya saja penelitian sebelumnya masih fokus pada analisis implementasi anggaran berbasis kinerja (Wijayanti *et. al.*, 2012), dan hubungan anggaran berbasis kinerja dengan kinerja aparat pemerintah desa (Erwati 2009; Verasvera 2016) serta kinerja keuangan dari kaca mata *value for money* (Kurrohman, 2013).

Penelitian ini mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait hubungan anggaran berbasis kinerja dengan penyerapan anggaran desa (Jualiani dan Sholihin, 2014; Maisarah, 2014; Handoko dan Rizki, 2012; Habiburrochman and Rizki, 2012) dan

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

mengolaborasikannya dengan penelitian Handayani (2019) dengan menambahkan variabel penggunaan informasi kinerja. Penambahan dua variabel yang jarang dikaitkan dengan anggaran berbasis kinerja ini untuk menguji secara empiris dugaan adanya peran efektivitas anggaran berbasis kinerja terhadap baik tidaknya akuntabilitas dan praktik penggunaan informasi keuangan.

Akuntabilitas kinerja sebagai konsekuensi dari efektivitas anggaran berbasis kinerja dan tingkat penyerapan anggaran menjadi penting dilakukan karena pada konteks pemerintah desa, tujuan utama dari pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan upaya pencapaian kinerja keuangan yang diprosikan dengan penyerapan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas kinerja non keuangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi serta UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kualitas dari akuntabilitas sendiri akan dapat dipengaruhi oleh baik tidaknya proses perencanaan dan penganggaran. Ditambahkannya variabel penggunaan informasi kinerja dilatarbelakangi alasan bahwa aktivitas ini berkaitan erat dengan anggaran berbasis kinerja. Ketika anggaran berbasis kinerja mulai

dijalankan, maka salah satu hal pertama yang harus dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk periode mendatang adalah mempelajari hasil pencapaian kinerja di periode sebelumnya.

Aktivitas ini penting dilakukan agar apa yang dirumuskan untuk periode mendatang dapat mengacu pada hasil capaian periode sebelumnya, baik untuk menentukan apakah suatu program kegiatan perlu dilanjutkan atau tidak, maupun dalam hal menentukan target capaian baru. Aspek ini juga sangat penting dilakukan pada program dan kegiatan yang bersifat multi tahun. Hingga saat ini, penelitian mengenai apakah penggunaan informasi kinerja memiliki hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih jarang diteliti, setidaknya sepengetahuan peneliti. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan pada desa dengan status desa mandiri di Kabupaten Berau.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemda Berau atau yang lain dalam upaya meningkatkan upaya pencapaian kinerja di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian penjelasan (*explanatory research*) yang berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel yang lain

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

melalui pengujian hipotesis (Creswell 2012). Dimensi waktu dalam penelitian menggunakan pendekatan *cross sectional*, yaitu penelitian dengan melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel untuk menguji hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Penelitian dilakukan di pemerintah desa di Kabupaten Berau yang memiliki status Desa mandiri. Obyek penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Desa yang memiliki status desa sebagai desa mandiri. Sedangkan penentuan responden penelitian yang menjadi sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, responden yang dipilih diyakini telah memahami kondisi di dalam pemerintah desa yang ditempatinya (Sihaloho dan Halim 2005; Nurkhamid 2008). Karena level analisis pada penelitian ini berada pada tingkat organisasi, maka setiap perangkat pemerintah desa diwakili oleh beberapa pimpinan perangkat desa sebagai responden. Berdasarkan kriteria sampel, maka yang terpilih sebagai responden terdiri dari: Kepala desa, Sekretaris desa, Kaur, Kasi, dan Aparatur Lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan

kuesioner melalui *Google form* yang telah dirumuskan oleh peneliti secara online ke seluruh aparatur pemerintah desa. Cara ini dipilih karena dinilai paling efektif untuk mendapat *respon rate* yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan teknik lain seperti mengirim via pos atau melalui survei internet.

Variabel-variabel penelitian ini adalah pertama: Anggaran Berbasis Kinerja, yakni proses penyusunan anggaran yang berfokus pada manfaat dari kegiatan atau program kerja dari organisasi, yang mana setiap kegiatan atau program kerja tersebut harus dapat diukur manfaat kinerjanya. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh (achyani dan cahya 2011) dengan beberapa indikator, yaitu: efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam memperbaiki program, efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam memperbaiki pengambilan keputusan, efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam koordinasi pelaksanaan program, efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam mengurangi overlapping proker, efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam Akuntabilitas, dan Efektivitas anggaran berbasis kinerja dalam evaluasi kinerja.

Variabel kedua adalah Penyerapan Anggaran diartikan sebagai tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah. Variabel ini diukur dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh (Juliani dan Sholihin 2014) dengan indikator- indikator sebagai

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

berikut: Perencanaan skala prioritas, perencanaan target, realisasi skala prioritas, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan komparasi dengan target tahun lalu. Selanjutnya adalah variabel Akuntabilitas Kinerja yang diartikan sebagai perasaan bertanggung jawab untuk mencapai target capaian dari suatu program/kegiatan/kebijakan.

Indikator-indikator variabel ini adalah laporan program, inisiatif akuntabilitas, dan koordinasi evaluasi yang diacu dari penelitian (Cavalluzzo dan Ittner 2004).

Variabel terakhir adalah Penggunaan Informasi Kinerja (PIK) yang didefinisikan sebagai berbagai jenis penggunaan informasi kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Variabel ini juga diukur dengan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh (Cavalluzzo dan Ittner 2004). Adapun indikator-indikatornya meliputi: PIK untuk menentukan prioritas proker, PIK untuk alokasi sumber daya, PIK untuk Koordinasi program, PIK untuk merivisi indikator kinerja, dan PIK untuk memperbaiki metode pencapaian kinerja.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan pendekatan SEM (*Structural Equation Model*) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Berikut langkah-langkah pengujian hipotesis dengan menggunakan PLS (Hartono dan Abdillah 2011), (1) Merancang Model Struktural (*Inner Model*), digunakan untuk

memprediksi hubungan kausalitas antar konstruk (variabel laten); (2) Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*), untuk menilai seberapa baik model yang diajukan untuk memprediksi konstruk yang diukur; (3) Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*) dan Konstruksi Diagram Jalur; (4) Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*), parameter untuk menilai model pengukuran adalah validitas konvergen dan validitas diskriminan yang diperoleh melalui proses interasi algoritma.

Uji Validitas, menggunakan indikator Outer Loading dan discriminant validity. Sedangkan uji reliabilitas, menggunakan parameter nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*; dan (5) Pengujian Hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai *T-table* dengan nilai *T-statistics* yang dihasilkan dari proses *bootstrap*.

ANALISIS DAN

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengumpulan data dari kuesioner yang telah disebarkan memerlukan waktu sekitar 1 (satu) minggu atau 7 hari kerja. Penelitian membandingkan 80 respon akhir (tiga hari kerja) dengan tanggapan sebelumnya yaitu sebesar 70 respon awal (tiga hari kerja pertama) menggunakan Mann-Whitney Test (Field 2009) untuk memastikan tidak ada jawaban yang bias. Hasil Mann-Whitney Test dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan antara tanggapan awal dan akhir tidak berbeda signifikan secara statistik. Simpulan itu

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

didasarkan pada nilai signifikansi [*Asymp. Sig. (2-tailed)*] yang lebih besar dari 0,05. Artinya, meskipun pengumpulan data terjadi pada periode yang sedikit berbeda, namun hal ini tidak mempengaruhi terhadap homogenitas data.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan teknik SEM menggunakan software SmartPLS. Sebelum dilakukan uji hubungan antar variabel, peneliti terlebih dahulu menguji kualitas instrumen, yakni validitas (deskriminan dan konvergen) dan reliabilitas. Validitas konvergen konstruk dilihat pada fitur *outer loading*, sementara validitas deskriminan dilihat pada fitur *discriminant validity*. Adapun reliabilitas konstruk diukur dari hasil perhitungan *Cronbach Alpha*. Hasil perhitungan kalkulasi algoritma pada Tabel 1, diketahui bahwa *outer loading*, *discriminant validity*, dan *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih dari angka 0,70, kecuali untuk konstruk Akuntabilitas (AKT) yang nilai *cronbach alpha* konstraknya di bawah 0,70, yakni 0,666. Karena angka ini sangat dekat dengan 0,70 dan lebih dari 0,60 serta konstruk akuntabilitas memiliki nilai validitas lebih dari 0,70, maka konstruk ini tetap dipertimbangkan memiliki kualitas validitas dan reliabilitas yang baik (Ringle *et al.* 2015). Dengan demikian, uji hipotesis penelitian dapat dilakukan.

Pada pengujian hipotesis, nilai *t* yang digunakan adalah 1,94 karena

penelitian ini merumuskan hipotesis alternatif berarah (Ghozali, 2008). Tabel 2 menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berhubungan positif terhadap penyerapan anggaran, artinya semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja maka penyerapan anggarannya berjalan baik pula (H_1 terdukung).

Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan anggaran yang benar-benar direncanakan dengan berorientasi pada kinerja, unit pemerintah desa tidak hanya membuat target kinerja kualitatif apa saja yang akan dicapai, tetapi juga mempertimbangkan alokasi dana dan waktu pencapaian yang biasanya diukur secara tri-wulanan, caturwulan, atau semesteran. Dengan demikian, maka tingkat penyerapan anggaran terjadwal secara rapi dan memudahkan pemerintah desa untuk melakukan kontrol serapan anggaran.

Anggaran berbasis kinerja juga berhubungan positif dengan akuntabilitas (H_2 terdukung). Terdukungnya H_2 mengindikasikan semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja, maka semakin baik pula akuntabilitas, khususnya kinerja dari pemerintah desa.

Sebagaimana laporan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, ketika aspek-aspek anggaran berbasis kinerja

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

benar-benar dapat dirumuskan dengan baik (koheren, detail, runtut, dan terukur), seperti koherensi antara masalah desa, strategi/program yang digalakkan untuk mengatasi masalah, kegiatan yang diusulkan, target capaian, indikator capaian, dan metode pengukuran kinerja, maka hal ini akan memudahkan pemerintah desa untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan informasi mengenai perkembangan program yang diselenggarakan. Sehingga, ketika akan dilaporkan ke dalam LAKIP, pemerintah desa tidak lagi kesulitan mencari data dan merumuskan laporan kinerjanya. Hal inilah yang mendukung terwujudnya kinerja pemerintah desa yang semakin baik.

Selain itu, penting untuk dilaporkan bahwa proses anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Berau dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, yakni dimana masyarakat dan perangkat-perangkat desa baik formal (LSM, RT, Karang Taruna, PKK, dsb) maupun non-formal (tokoh agama dan masyarakat) ikut dilibatkan dalam perencanaan yang disebut dengan Musrembangdes (Musyawarah Rerencanaan Pembangunan Desa). Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja yang disertai partisipasi penganggaran ini memunculkan adanya pengawasan dari masyarakat kepada Pemerintah Desa selaku agen, dan kemudian menggiring Pemerintah Desa untuk senantiasa memperbaiki kinerja

mereka.

Penelitian ini tidak berhasil mendukung H₃ yang menyatakan efektivitas anggaran berbasis kinerja berhubungan positif terhadap penggunaan informasi kinerja. Hasil ini kemungkinan karena penggunaan informasi kinerja oleh Pemerintah Desa pada fakta di lapangan merupakan suatu aktivitas mandatori atau wajib dilakukan. Karenanya apakah implementasi anggaran berbasis kinerja berjalan baik atau tidak, aparat pemerintah desa tetap wajib untuk menggunakan informasi kinerja dalam perencanaan dan penganggaran tahunmendatang (Akbar *et al.* 2012; Syachbrani dan Akbar 2013; Wijaya dan Akbar 2013).

Hipotesis yang terakhir diterima adalah H₄, yakni akuntabilitas yang baik akan memicu Pemerintah Desa untuk senantiasa menggunakan informasi kinerja dalam perencanaan di periode anggaran tahun berikutnya. Akuntabilitas yang baik dicirikan dengan laporan yang disampaikan tepat waktu, serapan anggarannya yang sesuai target dan informasi kualitatif kinerja mudah di pahami dan memiliki relevansi untuk digunakan sebagai acuan perencanaan untuk anggaran periode selanjutnya. Akuntabilitas yang baik ini menjadi acuan dan bahan pertimbangan awal untuk perencanaan dan penganggaran daerah di tahun anggaran berikutnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Bastian (2013) yang

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

menjelaskan bahwa hal ini juga tidak lepas dari keberlanjutan program.

Pasalnya, program desa tidak hanya dirumuskan untuk satu tahun anggaran saja, tetapi ada yang bersifat multi tahun, misalnya program pembangunan Jalan utama desa, Pembangunan Usaha Tani dll. Oleh karena itu, penting untuk mengamati capaian-capaian tahunan yang disajikan pada LAKIP yang dilaporkan dalam sistem keuangan desa, karena laporan pada sistem keuangan desa yang baik ini menjadi acuan pertama Pemerintah Desa dalam perumusan anggaran tahun mendatang.

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Penelitian

	Hipotesis	Original Sample	Nilai t Hitung
H1	ABK->PA	0,567	8,493*
H2	ABK->AKT	0,266	2,770*
H3	ABK->PIK	-0,070	0,634
H4	AKT->PIK	0,452	4,189*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian penelitian, ditemukan bahwa semakin baik implementasi anggaran berbasis kinerja maka penyerapan anggaran akan berjalan baik pula. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan anggaran yang benar-benar direncanakan dengan berorientasi pada kinerja, tingkat penyerapan anggaran akan terjadwal secara rapi, sehingga memudahkan pemerintah desa untuk memantau, mengevaluasi, dan

melaporkan informasi mengenai perkembangan program yang diselenggarakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan informasi kinerja di pemerintah daerah Kabupaten Berau tidak dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya implementasi anggaran berbasis kinerja yang berjalan.

Implikasi penting yang menjadi catatan adalah penting bagi pemerintah desa untuk menjalankan sistem anggaran berbasis kinerja yang benar-benar baik untuk mencapai penyerapan anggaran dan akuntabilitas yang baik pula, yakni status desa mandiri. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya implementasi anggaran berbasis kinerja yang tidak benar-benar berdasar pada kesadaran substantif, melainkan lebih kepada legitimasi dan ketepatan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Legitimasi dilakukan pemerintah desa agar pemerintah desa nampak sebagai organisasi yang mentaati Undang-Undang yang berlaku. Akhirnya, proses ini Nampak sebagai ketepatan palsu yang tidak berorientasi pada substansi pencapaian kinerja serapan anggaran dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, F., & B. T. Cahya. (2011). Analisis Aspek Rasional Dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Surakarta. *Maksimum*, 1(2).

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Akbar, R., R. Pilcher, & B. Perrin. (2012). Performance measurement in Indonesia: the case of local government. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 262-291.
- Bawono, A. D. B. (2015). *The Role of Performance Based Budgeting in the Indonesian Public Sector*, Department of Accounting and Corporate Governance, Macquarie University, Australia.
- Cavalluzzo, K. S., & C. D. Ittner. (2004). Implementing performance measurement innovations: evidence from government. *Accounting, organizations and society*, 29(3), 243-267.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publication.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009). *Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja* (PBK). 2 ed. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ezponiza, E. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS*: Sage publications.
- Ghozali, I. (2008). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square* (PLS), Universitas Diponegoro.
- Habiburrochman, & A. Rizki. (2012). Effect of Performance-Based Budgeting to Effectiveness of Control: (A Study Case at Indonesia's State University). Paper read at World Business Research Conference, Bangkok, Thailand.
- Hager, G., A. Hobson, & G. Wilson. (2001). Performance-Based Budgeting: Concepts and Examples. Frankfort, Kentucky: Committee for Program Review and Investigations.
- Handoko, A. W., & S. Ngumar. (2014). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja pada Dispenda Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(12), 1-16.
- Hartono, J., & W. Abdillah. (2011). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hatry, H. P. (2002). Performance Measurement: Fashions and Fallacies *Public Performance &*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Management Review*, 25(4), 352-358.
- Jong, M. d., I. v. Beek, & R. Posthumus. (2013). Introducing Accountable Budgeting: Lessons from a Decade of Performance-Based Budgeting in the Netherlands. *OECD Journal on Budgeting*, 3, 1-34.
- Juliani, D., & M. Sholihin. (2014). Pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap Persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/ jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 177-199.
- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja melalui Kinerja Keuangan yang Berbasis Value For Money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1), 1-11.
- Kusuma, E. A., & I. K. Budiarta. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan pada Ketepatan Anggaran (Studi Empiris di SKPD Pemerintah Provinsi Bali). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(3).
- Lestari, I. P. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Survei pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Locke, E. A., K. N. Shaw, L. M. Saari, G. P. Latham. (1981). Goal setting and task performance: 1969–1980. *Psychological bulletin*, 90(1), 125.
- Mackay, K. (2007). How to build M&E Systems to Support Better Government. Washington: World Bank.
- Maisarah, F. S. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Publik, dan APBD Berbasis Kinerja terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Banda Aceh. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh.
- Mulihartanti, M. T. (2017). *Analisis Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara (Studi Kasus untuk Tahun Anggaran 2011)*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nurkhamid, M. (2008). Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 3(1), 45-76.
- Osborne, D., & T. Gaebler. 1992. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Pratolo, S., & B. Jatmiko. (2017). *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Prayudi, M. A., & H. Basuki. (2014). Hubungan Aspek Power, Penerapan Sistem Pengendalian Administratif, Akuntabilitas, dan Efisiensi Program Jaminan Kesehatan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 57-77.
- Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta.
- Ringle, C. M., S. Wende, & J.-M. Becker. (2015). SmartPLS 3. *Boenningstedt: SmartPLS GmbH*
- Robinson, M. (2011). *CLEAR Training Materials: Performance-based Budgeting (Manual)*. Johannesburg: Regional Centers for Learning on Evaluation and Results.
- Robinson, M., & D. Last. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*. Washington DC: Fiscal Affairs Department - International Monetary Fund.
- Sihaloho, F., & A. Halim. (2005). Pengaruh Faktor-Faktor Rasional, Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Pemanfaatan Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*, 15-16.
- Sofyani, H., & R. Akbar. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 207-235.
- Syachbrani, W., & R. Akbar. (2013). Faktor-Faktor Teknis dan Keorganisasian yang Memengaruhi Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, 3(2).
- Tohom, A. (2015). Penyerapan Anggaran = Kinerja Anggaran?. *Warta Pengawasan XXII*, 2-9.
- Ulum, I., & H. Sofyani. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Verasvera, F. A. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2).
- Wang, X., & E. Berman. (2000). Hypotheses about Performance Measurement in Counties: Finding from a Survey. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 11(3), 403-428.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.01, April 2024, pp. 40– 52

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Wibisono, S. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(9), 1-22.
- Widodo, T. (2016). Performance-Based Budgeting: Evidence from Indonesia. Dissertation, College of Social Sciences, University of Birmingham, Birmingham, UK.
- Wijaya, A. H. C., & R. Akbar. (2013). The Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB*. 28(1), 62.
- Wijayanti, A. W., M. R. K. Muluk, & R. Nurpratiwi. (2012). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan. WACANA, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 15(3), 10-17.
- Yani, F. (2013). Pengaruh APBD Berbasis Kinerja dan Pengawasan DPRD terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Padang). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang.
- Jaka Saputra, H. ., & Suryadi. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Keuangan Kampung Terhadap Persepsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APBKamp) (Studi Di Kampung Bukit Makmur, Kabupaten Berau). *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 6(01), 86–101. <https://Doi.Org/10.35915/Accountia.V6i01.659>